

ABSTRAK

Kebutuhan Masyarakat di wilayah Kota Kendari akan kepastian hukum ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehingga setiap elemen – elemen dalam masyarakat yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan melaksanakan dan penegakan hukum tersebut haruslah memiliki parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum. Undang – Undang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin atau tersurat dalam Pasal 66 ayat (1), (2) UUJN dan Mempertahankan hak ingkar dan kewajiban ingkar itu harus dihormati juga cuma Peradilan dan kepolisian punya hak untuk memanggil Notaris yang bersangkutan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Dengan tujuan untuk mengadakan pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap notaris atas pemalsuan data yang dilakukan oleh klien di wilayah kota kendari

Bentuk Perlindungan hukum Notaris di wilayah kota kendari dalam pembuatan akta autentik harus memperhatikan prinsip kehati – hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. Sedangkan bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu, melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi Notaris supaya tetap berjalan di jalan yang benar yang sesuai dengan Undang – Undang. Ketika Notaris dipanggil dalam perkara pidana maka MKN berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan UUJN dan atau peraturan perundang– undangan yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya maka, MKN seharusnya tidak memberikan persetujuan Notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan. Serta bentuk perlindungan hukum dari INI berupa organ yang diberi nama bagian pengayoman itu mendampingi Notaris yang terkena masalah selama penyidikan dan memberikan konsultasi dan bantuan sehubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi Notaris bersangkutan. ..

Kata Kunci: *Perindungan Hukum, Notaris, UUJN.*

ABSTRACT

The needs of the people in the Kendari City area for legal certainty are very important in life so that every element in society that is related directly or indirectly to implementing and enforcing the law must have the same parameters, namely achieving legal certainty. The Law on Notary Position has regulated the form of legal protection that can be given to Notaries who carry out their duties as a public official, this is reflected or expressed in Article 66 paragraph (1), (2) UUJN and Defending the right of denial and the obligation of denial must be respected. also only the judiciary and the police have the right to summon the notary concerned.

This research was conducted using a normative juridical or statutory approach. With the aim of approaching the problem by looking at the prevailing laws and regulations regarding legal protection against notaries for data falsification committed by clients in the city area, the protection for notaries

Form of legal in the city area, although in making authentic deeds must pay attention to the precautionary principle - Carefulness, thoroughness, and upholding honesty, morality and not forgetting professionalism. Meanwhile, the form of legal protection from the Notary Honorary Council is to supervise and examine Notaries so that they can continue to walk on the right path in accordance with the Law. When a Notary is summoned in a criminal case, MKN has the authority to agree to be examined or not to be examined as long as the Notary has acted in accordance with UUJN and / or related laws and regulations in connection with the deed made before him, MKN should not give the Notary's approval to be examined or attend the trial. As well as the form of legal protection from THIS in the form of an organ named the part of the protection that accompanies the Notary who is affected by the problem during the investigation and provides consultation and assistance in connection with the legal problems faced by the Notary concerned.

Keywords: Legal Protection, Notary, UUJN.